



Integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Militer selain Perang

Kusendarto¹, Hari Wiwit W², Maswir³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: endararto361@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-10 Keywords: KBN; TNI AL; OMSP; Maritime Defense; Coastal Communities.	Kampung Bahari Nusantara (KBN) is a maritime-based coastal area development program that aims to improve community welfare and strengthen national resilience. This program aligns with the Indonesian Navy's (TNI AL) duties in carrying out Military Operations Other Than War (OMSP), particularly in the areas of territorial development, empowerment of maritime defense areas, and capacity building of maritime communities. This study aims to analyze the relevance and form of integration between the implementation of the KBN program and the role of the TNI AL in OMSP. The method used is descriptive qualitative through literature studies and field observations. The results of the study indicate that the integration of the KBN program with the TNI AL's OMSP duties has a positive impact on strengthening non-military defense through welfare approaches, maritime education, health, productive economy, and environmental conservation. The active involvement of the TNI AL in KBN not only builds harmonious relations between the military and coastal communities but also strengthens the national defense system from the grassroots level. Thus, the synergy between KBN and the TNI AL in implementing OMSP is a concrete form of the total defense approach in the modern era.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-10 Kata kunci: KBN; TNI AL; OMSP; Pertahanan Maritim; Masyarakat Pesisir.	Kampung Bahari Nusantara (KBN) merupakan program pengembangan wilayah pesisir berbasis kemaritiman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional. Program ini sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam bidang pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan peningkatan kapasitas masyarakat maritim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi serta bentuk integrasi antara pelaksanaan program KBN dengan peran TNI AL dalam OMSP. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literature dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi program KBN dengan tugas TNI AL OMSP memberikan dampak positif terhadap penguatan pertahanan non-militer melalui pendekatan kesejahteraan, pendidikan maritim, kesehatan, ekonomi produktif dan konservasi lingkungan. Keterlibatan aktif TNI AL dalam KBN tidak hanya membangun hubungan yang harmonis antara militer dan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat sistem pertahanan negara dari lapisan terbawah. Dengan demikian, sinergi antara KBN dengan TNI AL dalam menjalankan OMSP merupakan bentuk nyata dari pendekatan pertahanan semesta di era modern.

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah maritim yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan bergantung pada potensi laut untuk kehidupan mereka. Masyarakat pesisir, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, seringkali menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu upaya pemberdayaan dan pembangunan kawasan pesisir menjadi fokus

penting dalam memperkuat ketahanan nasional dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang ±108.000 km. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah pesisir dan perbatasan laut sebagai bagian strategis dalam sistem pertahanan negara. Namun, wilayah pesisir Indonesia kerap menghadapi berbagai permasalahan, selain permasalahan terkait dengan kemiskinan, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, masyarakat pesisir Indonesia juga dihadapkan

dengan masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat dan ancaman keamanan non-tradisional seperti penyelundupan, illegal fishing dan radikalisasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menginisiasi program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang merupakan sebuah program terpadu penggabungan antara pembangunan masyarakat pesisir dengan fungsi pertahanan negara. Program ini terbagi dalam lima klaster utama, yaitu klaster pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata dan pertahanan. Adapun pelaksanaan KBN merupakan bentuk konkret pelibatan TNI AL dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang tugasnya mencakup dalam membantu pembangunan daerah, mengatasi dampak bencana, serta memberdayakan wilayah pertahanan.

Integrasi antara KBN dengan tugas TNI AL dalam menjalankan OMSP mencerminkan transformasi peran TNI AL dari kekuatan tempur murni menjadi kekuatan yang juga mengedepankan pendekatan humanistik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pertahanan negara, sinergi ini memperkuat sistem pertahanan semesta (total defense system) dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian aktif dari pertahanan negara. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana integrasi program Kampung Bahari Nusantara dengan pelaksanaan OMSP oleh TNI AL yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah pesisir dan penguatan pertahanan negara.

Dalam konteks ini, Program Kampung Bahari hadir sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup yang berbasis pada potensi maritim. Selain itu program ini bertujuan untuk menciptakan desa-desa pesisir yang mandiri, maju, dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Namun dalam mewujudkan tujuan tersebut, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkisar pada aspek pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga terkait dengan keamanan laut. Ancaman terhadap kedaulatan negara di laut seperti perompakan, illegal fishing serta pelanggaran perbatasan wilayah menjadi isu yang perlu ditangani secara serius untuk memastikan

terciptanya lingkungan yang aman bagi masyarakat pesisir dan kegiatan ekonomi berbasis laut.

Dalam kerangka ini, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, sekaligus mendukung keberhasilan program Kampung Bahari. TNI AL, dengan tugasnya yang meliputi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tidak hanya bertanggung jawab dalam pertahanan dan pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan di wilayah pesisir. Dalam konteks Kampung Bahari, TNI AL berperan sebagai fasilitator yang membantu membangun infrastruktur, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan laut.

Integrasi antara Kampung Bahari dan peran TNI AL dalam melaksanakan OMSP telah memberikan peluang untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam menjaga keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sehingga dengan melalui kolaborasi ini, tidak hanya keamanan wilayah pesisir yang terjaga, tetapi juga pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai integrasi kedua aspek ini sebagai upaya untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan di wilayah maritim.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam mengenai integrasi antara Kampung Bahari dengan peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan fokus pada upaya menjaga keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, pandangan dan praktik yang terjadi di lapangan, yang sulit dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus untuk menganalisis integrasi antara program Kampung Bahari dengan peran TNI AL di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Selain itu studi kasus ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang terjadi di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut dalam menjaga

keamanan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa selain menjalankan operasi militer untuk perang, TNI juga memiliki peran penting dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang tersebut menjabarkan bahwa terdapat 14 jenis tugas OMSP, di antaranya adalah mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam dan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini.

Dari sejumlah tugas OMSP tersebut, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran strategis khususnya dalam konteks pemberdayaan wilayah maritim dan pesisir, serta penanggulangan kejahatan di laut dan penguatan masyarakat maritim sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sebagai bagian dari matra laut, TNI AL tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dari ancaman militer, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan non-tempur untuk mendukung stabilitas dan keamanan nasional. Peran ini sangat relevan dalam pelaksanaan OMSP seperti pembinaan teritorial maritim melalui kehadiran langsung di daerah-daerah pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir untuk menciptakan ketahanan wilayah, pemberantasan kejahatan di laut seperti penyelundupan, human trafficking dan illegal fishing serta penanggulangan bencana di wilayah perairan dan pesisir. Dengan demikian maka peran tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga strategis karena memperkuat konsep pertahanan negara secara semesta dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pertahanan nasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Kampung Bahari Nusantara (KBN) merupakan implementasi nyata peran TNI AL dalam konteks OMSP, mengingat bahwa dengan pendekatan tersebut, TNI AL mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir sekaligus

memperkuat posisi strategis pertahanan negara di wilayah perairan.

Adapun pelaksanaan tugas OMSP oleh TNI AL memiliki dampak strategis jangka panjang dalam membangun ketahanan wilayah pesisir sebagai garda depan pertahanan negara, selain itu juga dapat mewujudkan masyarakat maritim yang sadar bela negara dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan militer dan mengedepankan soft power berbasis kesejahteraan. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra TNI di mata masyarakat khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan rawan konflik. Selain itu dengan melalui pendekatan program seperti Kampung Bahari Nusantara, TNI AL berhasil menjabarkan peran OMSP ke dalam bentuk nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung sistem pertahanan nasional berbasis rakyat.

B. Kampung Bahari Nusantara

Kampung Bahari Nusantara (KBN) pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Pada saat itu, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar masih terisolasi dan memiliki akses terbatas terhadap berbagai fasilitas dan teknologi. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang belum dikelola secara optimal. Program Kampung Bahari Nusantara bertujuan untuk membuka akses masyarakat pesisir terhadap peluang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemerintah ingin memanfaatkan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia di daerah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Adapun tujuan utama dari Program Kampung Bahari Nusantara adalah untuk menciptakan desa pesisir yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam, terutama di bidang kelautan dan perikanan yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat

memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan sosial antara wilayah pesisir dengan wilayah perkotaan.

Selain itu Kampung Bahari Nusantara diharapkan dapat menjadi model bagi daerah-daerah pesisir lainnya untuk mengembangkan potensi lokal mereka dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Program Kampung Bahari Nusantara merupakan bagian dari visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang kuat dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.

Kampung Bahari Nusantara (KBN) merupakan program inisiasi dari TNI Angkatan Laut sebagai bentuk penguatan potensi maritim nasional dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara langsung. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kawasan pesisir sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, sekaligus sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi, budaya dan sumber daya alam yang besar namun sering kali tertinggal dari sisi pembangunan. Tujuan utama dari KBN adalah untuk menciptakan kampung-kampung binaan TNI AL yang mandiri, sejahtera dan tangguh terhadap berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Sehingga dengan melalui program ini TNI AL berusaha mengintegrasikan kekuatan militer dengan pendekatan soft power berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu Kampung Bahari Nusantara sendiri dibangun di atas lima klaster utama yang secara terpadu menyasar kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pertahanan negara, yang pada akhirnya klaster tersebut bertujuan untuk membentuk ekosistem sosial yang tangguh sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah maritim, adapun klaster tersebut meliputi:

1. Klaster Pertahanan. Pelaksanaan pada klaster pertahanan meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara dan kesadaran pertahanan masyarakat pesisir.
2. Klaster Kesehatan. Pelaksanaan pada klaster kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, posyandu, penyuluhan gizi dan sanitasi lingkungan.
3. Klaster Pendidikan. Pelaksanaan pada klaster pendidikan meliputi penyediaan

fasilitas belajar, pelatihan keterampilan dan peningkatan literasi masyarakat.

4. Klaster Ekonomi. Pelaksanaan klaster ekonomi meliputi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah seperti perikanan, kerajinan atau agrowisata.
5. Klaster Pariwisata. Pelaksanaan pada klaster pariwisata meliputi promosi potensi wisata bahari lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung diplomasi budaya.

Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), program Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu bentuk implementasi nyata peran TNI AL di luar fungsi tempur. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas OMSP mencakup pemberdayaan wilayah pertahanan, membantu tugas pemerintahan di daerah, mengatasi dampak bencana dan krisis kemanusiaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga dengan membangun dan membina KBN, TNI AL menjalankan perannya dalam membentuk wilayah pertahanan yang aktif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan semesta.

Adapun Kampung Bahari Nusantara memiliki dampak strategis dalam berbagai aspek diantaranya dari aspek pertahanan dan keamanan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga wilayah perairan, sekaligus membentuk jaringan pertahanan rakyat di daerah maritim. Selain itu dari aspek pembangunan daerah dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar di wilayah pesisir terpencil. Dari aspek ketahanan sosial dan ekonomi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran dan keterisolasian. Terakhir dari aspek penguatan citra TNI AL dapat menunjukkan bahwa militer bukan hanya alat perang, tetapi juga agen pembangunan dan pelindung masyarakat.

Walaupun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan KBN juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk pembinaan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang belum optimal antara TNI AL

dengan pemerintah daerah dan lembaga sipil, selain itu masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap peran TNI yang dapat berisiko melemahkan kemandirian. Sehingga untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan swasta dalam pendanaan dan pembinaan KBN, percepatan dalam menyusun peta jalan (roadmap) untuk kepentingan pengembangan jangka panjang KBN yang berkelanjutan dan dapat melibatkan lembaga pendidikan dan riset untuk mengukur dampak serta mengembangkan inovasi berbasis lokal.

Dengan demikian program Kampung Bahari Nusantara merupakan contoh konkrit sinergi antara fungsi pertahanan dengan pembangunan nasional. Sehingga integrasi program Kampung Bahari Nusantara dengan peran TNI AL dalam menjalankan tugas OMSP menunjukkan bagaimana kekuatan militer dapat bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang memperkuat ketahanan nasional dari bawah, terutama di wilayah maritim yang strategis.

C. Integrasi Kampung Bahari Nusantara Dengan Peran TNI AL Dalam Operasi Militer Selain Perang

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa selain menjalankan fungsi tempur, TNI juga memiliki tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan OMSP oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL) adalah melalui program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang merupakan bentuk keterlibatan aktif TNI AL dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan wilayah, serta penguatan ketahanan nasional. Kampung Bahari Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai wadah pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh di wilayah maritim. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI, khususnya pada poin tugas TNI OMSP yang mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, memberdayakan wilayah pertahanan, membantu mengatasi dampak bencana dan membantu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sebagai pelaksana utama program KBN, TNI AL tidak hanya menjadi inisiator, tetapi juga motor penggerak perubahan di wilayah

pesisir. Melalui pendekatan pembinaan teritorial maritim dan intervensi sosial kemasyarakatan, TNI AL menjalankan peran OMSP dengan cara menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan dasar, membina keterampilan dan ekonomi lokal masyarakat nelayan, menumbuhkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, membantu mitigasi bencana di wilayah pesisir serta memperkuat komunikasi sosial antara militer dan rakyat. Sehingga hal ini membuktikan bahwa KBN merupakan bentuk soft power militer yang bersifat humanis dan preventif, berbeda dengan pendekatan keras (hard power) yang biasa digunakan dalam operasi militer konvensional. Selain itu dengan adanya lima klaster dalam program KBN yang terdiri dari klaster pertahanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata, maka secara langsung KBN adalah bentuk dukungan dari TNI AL dalam mengimplementasikan tugas OMSP.



Gambar 1. Model Kesiapan Kampung Bahari Nusantara

Sumber: Diolah oleh Samsul Bahri, 2024

Adapun integrasi KBN dengan peran TNI AL dalam menjalankan tugas OMSP menciptakan dampak berlapis bagi ketahanan nasional, baik pada aspek sosial dalam membangun kohesi sosial antara masyarakat dengan aparat militer, aspek ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan peluang usaha di sektor maritime, aspek budaya dalam melestarikan kearifan lokal sebagai identitas bangsa serta aspek keamanan dalam menekan potensi kejahatan di laut seperti penyelundupan dan illegal fishing. Hal ini tentunya dapat menjadikan integrasi dalam memperkuat konsep pertahanan semesta (total defense) yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedaulatan, terutama di wilayah-wilayah rawan dan perbatasan.

Meskipun integrasi ini membawa banyak manfaat, sejumlah tantangan juga masih dihadapi. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi KBN dengan OMSP sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi, komitmen pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Sehingga integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan peran TNI AL dalam menjalankan OMSP dapat menunjukkan pendekatan modern dalam membangun kekuatan pertahanan negara melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. TNI AL tidak hanya menjalankan fungsi militer, tetapi juga hadir sebagai agen perubahan sosial, pelindung masyarakat dan penggerak pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa pertahanan negara bukan hanya urusan senjata, tetapi juga soal membangun manusia, wilayah dan kesejahteraan nasional secara terpadu. Sehingga integrasi Kampung Bahari Nusantara (KBN) dengan peran TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam OMSP menunjukkan sinergi strategis antara kekuatan militer dengan pembangunan masyarakat maritime, mengingat bahwa KBN merupakan program pembangunan berbasis maritim yang menyasar wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar yang selama ini rentan terhadap keterbelakangan, kemiskinan dan gangguan stabilitas.

TNI AL melalui OMSP memiliki mandat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas wilayah, memberdayakan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. Sehingga dalam konteks ini pelaksanaan KBN menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi OMSP, terutama dalam hal:

1. Pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang memungkinkan KBN dapat memperkuat ketahanan wilayah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga mampu menciptakan efek pertahanan yang bersifat non-konvensional.
2. Peningkatan sinergitas militer-sipil dengan cara berkolaborasi antara TNI AL dengan instansi pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat sipil dalam program KBN dengan memperlihatkan implementasi OMSP yang menitikberatkan pada pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society*.
3. Deterrence non-militer dengan cara KBN berkontribusi dalam meningkatkan

kesadaran bela negara masyarakat maritim sehingga dapat menciptakan wilayah pesisir yang tangguh dan berdaya saing, yang secara tidak langsung dapat memperkuat postur pertahanan negara di daerah rawan konflik dan pelanggaran hukum laut.

4. Implementasi soft power TNI AL melalui KBN merupakan contoh dari strategi soft power yang dilakukan oleh TNI AL, di mana peran militer lebih menonjol dalam bentuk dukungan pembangunan, edukasi, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, integrasi KBN ke dalam peran OMSP oleh TNI AL tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi juga memperluas peran pertahanan negara ke ranah sosial dan ekonomi melalui pendekatan humanis, kolaboratif dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Integrasi Kampung Bahari Nusantara (KBN) dengan peran TNI Angkatan Laut dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan wilayah maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan ketahanan nasional. Melalui program KBN, TNI AL tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam aspek sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat maritim. Implementasi KBN menunjukkan bahwa OMSP oleh TNI AL dapat dioptimalkan melalui pendekatan multidimensi, yakni melalui pembinaan teritorial, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sinergi lintas sektor. Peran TNI AL dalam KBN menjadi wujud nyata kontribusi pertahanan negara dalam kondisi damai, dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Namun, agar integrasi ini berjalan optimal, dibutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara TNI AL, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat lokal. Dengan demikian saat ini KBN dapat menjadi model pembangunan berbasis kemaritiman yang berkelanjutan serta menjadi bagian dari strategi pertahanan nonmiliter yang efektif.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Militer selain Perang.

DAFTAR RUJUKAN

- Clausewitz, C. v. (1976). *On War* (M. Howard & P. Paret, Eds.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Cohen, R., & Oates, W. (2018). *Civil-Military Relations And Community Resilience*. London: Routledge.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), Definisi Pemberdayaan Masyarakat ialah Memberikan Sumber Daya, Kesempatan, Pengetahuan, Dan Keterampilan Kepada Warga Untuk Meningkatkan Kemampuan Mereka Dalam Menentukan Masa Depan Mereka Sendiri Dan Berpartisipasi Pada Upaya Mempengaruhi Kehidupan Dari Kelompoknya
- Iwan Kuswanto, 2023. *Pengembangan Kampung Bahari Nusantara Guna Mendukung Ekonomi Biru Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan (2021) *Potensi Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil* (2018). Statistik Kelautan Dan Perikanan Indonesia 2018
- Puteri, D. N. (2021). Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perbatasan Indonesia (The Role Of The National Border Management Authority Republic Of Indonesia In Supervising Indonesia' S Borders). 5(1).
- Putri, L. (2021). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, M. (2019). *Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rahmatullah, F. (2023). "Efektivitas Klaster Pertahanan Dalam Kampung Bahari Nusantara." *Jurnal Maritim Dan Pertahanan*, 15(1), 77-89.
- Sari, A. (2020). *Pembangunan Berbasis Pertahanan Di Wilayah Perbatasan*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- TNI AL. (2022). *Panduan Program Kampung Bahari Nusantara*. Jakarta: Mabes TNI AL.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- Yusuf, R. (2021). "Peran Militer Dalam Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Perbatasan." *Jurnal Strategi Nasional*, 12(2), 143-159.
- Yusuf, R. (2022). *Kampung Bahari Nusantara: Strategi Pemberdayaan Wilayah Perbatasan*. Surabaya: Universitas Maritim.
- Zihni Ihkamuddin, dkk. Efektivitas Program Kampung Bahari Dalam Menjaga Kondisi Sosial Masyarakat Pesisir Di Semarang Dari Perspektif Sosiologi Maritim. *Jurnal Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI*. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019 <https://core.ac.uk/download/pdf/322628706.pdf>